



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR** 903/19654  
170-10-2021

**TANGGAL 15 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2021**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR :** 903/19654  
170-10-2021

**TANGGAL 15 OKTOBER 2021**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.**  
Jabatan : **BUPATI PURBALINGGA**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. a. Nama : **H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- b. Nama : **H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- c. Nama : **Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**
- d. Nama : **H. ADI YUWONO, S.H.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga**  
Alamat Kantor : **Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga**

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2022, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah TA 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Purbalingga, 15 Oktober 2021

**BUPATI PURBALINGGA**

selaku

**PIHAK KE I,**

  
Dyah HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.

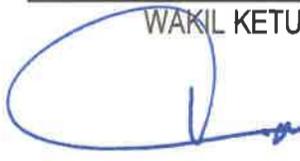
**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

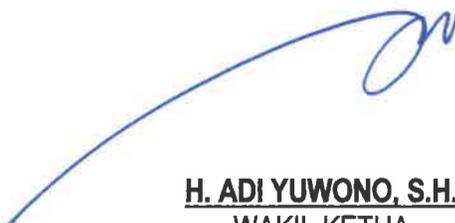
selaku

**PIHAK KE II,**

  
H.R. BAMBANG IRWAN, S.H.  
KETUA

  
H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si.  
WAKIL KETUA

  
Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.  
WAKIL KETUA

  
H. ADI YUWONO, S.H.  
WAKIL KETUA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran berupa APBD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun dan menyepakati PPAS Tahun Anggaran 2022.

PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 berisikan rancangan program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022. Sedangkan RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

### B. Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2022

Penyusunan PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 untuk seluruh urusan pembangunan, baik urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Juga menyajikan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan anggaran untuk masing-masing program pembangunan dan disertai plafon anggaran untuk masing-masing urusan dan program pembangunan.

### C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun 2022

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

## II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

### A. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengupayakan peningkatan alokasi pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer, serta mengupayakan peningkatan alokasi Dana-dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, maupun dana lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diproyeksikan mencapai Rp.2.015.331.088.000,00 yang bersumber dari :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah / PAD

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.280.256.514.000,00. Apabila dibandingkan dengan PAD dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2021, pendapatan tersebut naik sebesar Rp.21.963.286.000,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2022, sumbangan PAD tersebut mencapai angka 13,91%. Kenaikan PAD di Tahun 2022 paling besar berasal dari Pendapatan BLUD.

#### 2. Pendapatan Transfer

1) Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp.1.719.087.824.000,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer dalam APBD Murni Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.39.565.386.000,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2022, sumbangan Pendapatan Transfer tersebut mencapai angka 85,30%.

Sumbangan terbesar pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.591.955.824.000,00 dengan komponen Dana Perimbangan sebesar Rp.1.344.587.620.000,00 yang terdiri dari : DBH sebesar Rp.27.096.587.000,00, DAU sebesar Rp.830.529.715.000,00 dan Dana Transfer Khusus/Dana Alokasi Khusus (DAK)

yang diproyeksikan sebesar Rp.486.961.318.000,00 yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp.171.045.996.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.315.915.322.000,00, serta Dana Desa sebesar Rp.247.368.204.000,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi diproyeksikan sebesar Rp.127.132.000.000,00.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan dari bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.15.986.750.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Hibah. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2022, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut mencapai angka 0,79%. Dan apabila dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.89.113.100.000,00 Penurunan ini karena sesuai dengan informasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, pendapatan dana BOS bergeser ke komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

## B. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.63.750.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021.

Adapun proyeksi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Target Penerimaan Daerah TA. 2022**

NO.	PENERIMAAN DAERAH	PROYEKSI TA 2022
1	2	3
<b>A. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>2.015.331.088.000</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>280.256.514.000</b>
1.1	Pajak Daerah	55.825.000.000
1.2	Retribusi Daerah	13.490.181.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.956.312.000
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	192.985.021.000
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.719.087.824.000</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.591.955.824.000
2.1.1	Dana Perimbangan	1.344.587.620.000
2.1.1.1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	27.096.587.000
2.1.1.2	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	830.529.715.000
2.1.1.3	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Fisik	171.045.996.000
2.1.1.4	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik	315.915.322.000

<b>NO.</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>PROYEKSI TA 2022</b>
2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	-
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-
2.1.4	Dana Keistimewaan	-
2.1.5	Dana Desa	247.368.204.000
2.2	Transfer Antar Daerah	127.132.000.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	113.115.000.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	14.017.000.000
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>15.986.750.000</b>
3.1	Hibah	15.986.750.000
<b>B. JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>63.750.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>63.750.000.000</b>
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. 2021 (SiLPA)	63.750.000.000
4.2	Pencairan dana cadangan	
4.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
4.4	Penerimaan pinjaman daerah	
4.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
4.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH (A+B)</b>		<b>2.077.706.088.000</b>

### III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

#### A. Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan utamanya pada recovery pasca pandemi Covid-19, serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dimaksud, tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan tema "Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal serta Didukung Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Memadai", dengan menitikberatkan pada beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, dengan fokus pada:
  - a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran, berupa:
    - Fasilitasi proses produksi;
    - Fasilitasi permodalan usaha;
    - Pengembangan branding produk Usaha Mikro Kecil Purbalingga;
    - Pelatihan kewirausahaan;
    - Pengembangan sentra IKM.
  - b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:
    - Program Kartu Pra Kerja Purbalingga;
    - Mendorong Percepatan Realisasi Investasi;
    - Sinergitas Pelatihan Ketrampilan Produktif.
  - c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain melalui:

- Pengembangan sinergitas pelaku wisata dan pendukung wisata;
  - Mendorong Penyelenggaraan Event nasional dan Internasional;
  - Peningkatan kapasitas Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif;
  - Revitalisasi Tourism Information Center (TIC);
  - Penguatan dan Pengembangan Desa Wisata.
- d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis, antara lain melalui:
- Asuransi Pertanian;
  - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pertanian;
  - Pengembangan komoditas pertanian unggulan dan bernilai tambah tinggi;
  - Pengembangan Klaster Ikan Hias.
- e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat.
- Rehabilitasi Pasar Pemda;
  - Rehabilitasi Pasar Desa;
  - Sertifikasi Pasar Rakyat;
2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain melalui:
- Peningkatan Akses Pangan utamanya bagi kelompok rentan;
  - Peningkatkan Akses Air Bersih;
  - Penyediaan Rumah Layak Huni;
  - Peningkatan Akses Sanitasi Masyarakat.
- b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), antara lain melalui:
- Santunan Kematian Bagi Keluarga Kurang Mampu;
  - Revitalisasi Rumah Singgah;
  - Peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial;
  - Fasilitasi dan Bantuan kepada PPKS.
3. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus;
- b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang;
- c. Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah;
- d. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, utamanya melalui
    - Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
    - Peningkatan image layanan kesehatan pemerintah;
    - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
    - Integrasi Pembiayaan Kesehatan; dan
    - Peningkatan SDM Kesehatan.
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, utamanya melalui
    - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan;
    - Gerakan Kembali ke Sekolah;
    - Penguatan PKBM / Kejar Paket;
    - Peningkatan Manajemen Sekolah; dan
    - Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi.
  - c. Peningkatan cakupan pelayanan KB;
  - d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak, utamanya melalui:
    - Pembentukan Desa Ramah Anak;
    - Revitalisasi Forum Lintas Perempuan.
  - e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga, utamanya melalui:
    - Fasilitasi pemuda bertalenta tinggi dan berprestasi;
    - Fasilitasi berkembangnya olahraga prestasi.
5. Penguatan Desa, dengan fokus pada:
  - a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik;
  - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;
  - c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui:
    - Digitalisasi desa;
    - Pembinaan dan pengawasan administrasi desa;
    - Penghargaan desa berprestasi.
  - d. Peningkatan sarana dan prasarana desa.
6. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan regulasi dan sistem penunjang kinerja;
- b. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui:
  - Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
  - Membangun lingkungan budaya birokrasi yang bersih dan melayani.
- c. Peningkatan Inovasi pelayanan publik, antara lain melalui:
  - Digitalisasi Pelayanan Publik dalam Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi;
  - Pembangunan Mall Pelayanan Publik;
  - Satu OPD satu Inovasi Pelayanan Publik.
- d. Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, melalui
  - Memfasilitasi komunikasi antar dan intern umat beragama;
  - Penguatan aparat Trantibum;
  - Mendorong ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat;
  - Peningkatan ketahanan bencana;
  - Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.

Adapun matriks Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 berikut:

TABEL III.1. KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2019/2020*)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022
1	2	3	4		7
<b>Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.</b>					
<b>Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik</b>		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,09 (B)	70
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	61,5	70
<b>Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia</b>					
<b>Tujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran</b>		Angka konflik sosial dan kriminalitas	per 10.000 pddk	1,96	1,64
1.	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum	Angka konflik sosial	per 10.000 pddk	0,39*	0,29
		Angka kriminalitas	per 10.000 pddk	1,91	1,60
<b>Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak</b>					
<b>Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>		Angka Kemiskinan	Persen	15,9	14,5 – 15,5
1.	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	80,15	80,5
		Cakupan akses air minum layak	Persen	92,05	93
		Cakupan sanitasi layak	Persen	92,26	93,25
		Cakupan Kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan	Persen	99,39	98,66

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2019/2020*)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022
1	2	3	4		7
2.	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Cakupan warga miskin dalam DTKS	Persen	57,77	57,37
<b>Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat</b>					
<b>Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender</b>		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,97	69,57
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,68	92,93
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Tahun	11,99	12,01
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,14	73,38
3.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	70,6	70,9
		Kabupaten Layak Anak	Nilai	374,98	600
<b>Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja</b>					
<b>Tujuan: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah</b>		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,23	4 – 4,5
1.	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah	Nilai PDRB Per Kapita	Rupiah /jiwa	24.798.270	26.218.796
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,0	5 - 6
<b>Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa</b>					
<b>Tujuan: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa</b>		Indeks Desa Membangun	Angka	0,68	0,73

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI EKSISTING (2019/2020*)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022
1	2	3	4		7
1.	Meningkatnya status kemandirian desa	Persentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju	Persen	34,38	38,39
<b>Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan</b>					
<b>Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>		Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	84,25	86,8
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,91	68,95
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Indeks jalan mantap	Angka	78,5	81,1
		Ratio konektivitas angkutan jalan	Persen	90	92,5
		Persentase luas oncoran air irigasi	Persen	66	70
2.	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Ketaatan pelaksanaan penataan ruang	Persen	87,41	89
<b>Tujuan : Lestarinya daya dukung lingkungan hidup</b>		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,91	68,95
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	P Angka oin	67,91	68,95

## B. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan prioritas pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2021, sebagai bentuk keselarasan antara kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Oleh karena itu, kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diselaraskan dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel III.2**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan**  
**Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021**

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Nasional
Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Prioritas 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; serta Prioritas 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Penguatan Desa	Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Peningkatan Pelayanan Publik	Prioritas 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Di samping itu, pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 juga diselaraskan dengan prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Mendasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM, dengan fokus sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Kebijakan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan yaitu pemenuhan basic need access untuk mengurangi beban pengeluaran, sustainable livelihood untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Sasaran kebijakan ini terutama adalah untuk penduduk miskin dan rentan miskin utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya termasuk kelompok penduduk terdampak Covid-19 secara sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan penurunan pengangguran diarahkan pada perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja, serta pengawasan tenaga kerja.
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembangunan perempuan dan anak.
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah Kebijakan tata kelola pemerintahan diarahkan pada penguatan kapasitas, pola kerja birokrasi, dan reformasi birokrasi yang lebih adaptif

terhadap segala dinamika yang terjadi. Kebijakan kondusivitas wilayah diarahkan pada penguatan kebersamaan, dan gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Sedangkan kebijakan peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

**Tabel III.3**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Prioritas Kabupaten Purbalingga	Selaras Dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah
Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah	Prioritas 1 : Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat	Prioritas 2 : Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan	Prioritas 1 : Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana; dan Prioritas 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Prioritas 3 : Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing
Penguatan Desa	Prioritas 2 : Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; dan Prioritas 4 : Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah
Peningkatan Pelayanan Publik	Prioritas 4 : Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

#### **IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN**

Dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, plafon anggaran yang dihitung dan didistribusikan per urusan dan satuan kerja hanya yang merupakan plafon anggaran sementara untuk belanja urusan sesuai kewenangan. Sedangkan untuk plafon anggaran belanja tidak terduga dan belanja transfer dihitung dengan tanpa dibagi menurut urusan dan satuan kerjanya. Belanja urusan sesuai kewenangan dihitung dengan mengurangi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dengan kebutuhan anggaran belanja tidak terduga dan belanja transfer serta pengeluaran pembiayaan. Kemampuan penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk belanja urusan sesuai kewenangan Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.2.073.343.588.000,-.

Plafon anggaran belanja urusan sesuai kewenangan tersebut selanjutnya didistribusikan untuk membiayai seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten baik itu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

##### **A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan daerah**

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2022 sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 telah disusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara rinci tertuang dalam Tabel IV.1.

**Tabel IV.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**TA 2022**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	771.172.930.000	
1.01.2.22.0.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	771.172.930.000	
1.01.2.22.0.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	735.905.530.000	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	541.030.240.000	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.525.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.525.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	539.182.613.000	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	538.063.200.000	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	786.658.000	
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	332.755.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	396.002.000	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	396.002.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.750.000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.495.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.300.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.955.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.600.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.393.000	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.260.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.425.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.108.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.957.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206.590.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.200.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.167.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	194.503.883.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	135.812.806.000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	398.743.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	321.440.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.688.434.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.340.000.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.836.837.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	193.500.000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.525.655.000	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	38.795.000.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	200.382.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	13.573.000	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.370.100.000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	35.394.000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	64.460.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68.985.900.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	181.000.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5.862.388.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.314.793.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	708.000.000	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	370.000.000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.741.980.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11.877.338.000	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.481.350.000	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	72.400.000	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	880.000.000	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	5.870.000.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.412.680.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	152.000.000	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	18.425.000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.273.470.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	144.474.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	174.500.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	20.436.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.429.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	93.500.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	45.275.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	834.925.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.040.000	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.481.000.000	
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	216.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.419.910.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	177.138.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	564.111.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	53.141.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	950.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	275.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	28.715.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.837.700.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	114.493.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	128.612.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.291.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.956.374.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	300.462.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	65.812.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.590.100.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	371.407.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	371.407.000	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	371.407.000	
1.01.2.22.0.00.02.0001	TK NEGERI PEMBINA PURBALINGGA	155.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	155.200.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	155.200.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	85.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0002	TK NEGERI PEMBINA BOBOTSARI	124.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.000.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	124.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	54.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0003	TK NEGERI PEMBINA BOJONGSARI	126.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	126.400.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	126.400.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	56.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0004	TK NEGERI PEMBINA BUKATEJA	133.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	133.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	133.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	70.000.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	63.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.0020	SMP NEGERI 1 PURBALINGGA	952.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	952.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	952.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	917.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0022	SMP NEGERI 3 PURBALINGGA	876.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	876.500.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	876.500.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	841.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0024	SMP NEGERI 5 PURBALINGGA	842.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	842.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	842.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	807.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0025	SMP NEGERI 1 KALIMANAH	975.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	975.500.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	975.500.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	940.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.0027	SMP NEGERI 3 KALIMANAH	438.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	438.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	438.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	388.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0029	SMP NEGERI 2 PADAMARA	598.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	598.200.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	598.200.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	563.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0031	SMP NEGERI 2 KUTASARI	696.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	696.100.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	696.100.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	661.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.0032	SMP NEGERI 3 KUTASARI	433.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.900.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	433.900.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	383.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.0041	SMP NEGERI 3 KEMANGKON	329.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	329.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	329.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	259.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.0043	SMP NEGERI 1 BUKATEJA	938.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	938.400.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	908.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	873.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0044	SMP NEGERI 2 BUKATEJA	874.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	874.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	874.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	839.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0046	SMP NEGERI 1 KEJOBONG	785.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	785.200.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	785.200.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	750.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.0051	SMP NEGERI 2 PENGADEGAN	450.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	450.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	450.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	400.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.0057	SMP NEGERI 2 KARANGMONCOL	326.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	326.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	326.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	256.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.0064	SMP NEGERI 2 BOJONGSARI	747.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	747.800.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	747.800.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	712.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.21	SMP NEGERI 2 PURBALINGGA	872.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	872.100.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	872.100.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	837.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.23	SMP NEGERI 4 PURBALINGGA	737.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	737.900.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	737.900.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	702.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.26	SMP NEGERI 2 KALIMANAH	904.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	904.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	904.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	869.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.28	SMP NEGERI 1 PADAMARA	830.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	830.900.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	830.900.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	845.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.30	SMP NEGERI 1 KUTASARI	866.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	866.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	866.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	831.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.33	SMP NEGERI 4 KUTASARI	641.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	641.100.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	641.100.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	606.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.34	SMP NEGERI 1 KARANGREJA	692.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	692.800.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	692.800.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	657.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.35	SMP NEGERI 2 KARANGREJA	574.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	574.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	574.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	524.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.36	SMP NEGERI 3 KARANGREJA	551.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	551.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	551.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	501.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.37	SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU	420.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	420.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	420.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	370.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.38	SMP NEGERI 2 KARANGJAMBU	209.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	209.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	209.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	139.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.39	SMP NEGERI 1 KEMANGKON	873.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	873.200.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	873.200.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	838.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.40	SMP NEGERI 2 KEMANGKON	378.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	378.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	378.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	308.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.42	SMP NEGERI 4 KEMANGKON	361.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	361.500.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	361.500.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	291.500.000	
1.01.2.22.0.00.02.45	SMP NEGERI 3 BUKATEJA	715.900.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	715.900.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	715.900.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	680.900.000	
1.01.2.22.0.00.02.47	SMP NEGERI 2 KEJOBONG	395.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	395.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	395.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	345.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.48	SMP NEGERI 1 KALIGONDANG	974.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	974.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	974.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	939.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.49	SMP NEGERI 2 KALIGONDANG	557.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	557.100.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	557.100.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	507.100.000	
1.01.2.22.0.00.02.50	SMP NEGERI 1 PENGADEGAN	765.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	765.400.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	765.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	730.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.52	SMP NEGERI 3 PENGADEGAN	359.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	359.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	359.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	289.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.53	SMP NEGERI 1 REMBANG	864.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	864.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	864.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	829.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.54	SMP NEGERI 2 REMBANG	670.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	670.800.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	670.800.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	635.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.55	SMP NEGERI 4 REMBANG	279.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	279.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	209.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.56	SMP NEGERI 1 KARANGMONCOL	888.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	888.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	888.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	853.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.58	SMP NEGERI 3 KARANGMONCOL	219.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	219.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	149.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.59	SMP NEGERI 4 KARANGMONCOL	341.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	341.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	341.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	271.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.60	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	890.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	890.800.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	890.800.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	855.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.61	SMP NEGERI 1 KERTANEGARA	635.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	635.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	635.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	600.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.62	SMP NEGERI 2 KERTANEGARA	479.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	479.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	479.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	429.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.63	SMP NEGERI 1 BOJONGSARI	966.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	966.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	966.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	931.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.65	SMP NEGERI 1 MREBET	856.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	856.700.000	

1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	856.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	821.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.66	SMP NEGERI 2 MREBET	668.600.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	668.600.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	668.600.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	633.600.000	
1.01.2.22.0.00.02.67	SMP NEGERI 3 MREBET	476.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	476.800.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	476.800.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	426.800.000	
1.01.2.22.0.00.02.68	SMP NEGERI 4 MREBET	450.400.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	450.400.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	450.400.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	400.400.000	
1.01.2.22.0.00.02.69	SMP NEGERI 5 MREBET	479.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	479.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	479.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	429.000.000	
1.01.2.22.0.00.02.70	SMP NEGERI 1 BOBOTSARI	873.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	873.200.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	873.200.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	838.200.000	
1.01.2.22.0.00.02.71	SMP NEGERI 2 BOBOTSARI	753.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	753.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	753.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	35.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	718.300.000	
1.01.2.22.0.00.02.72	SMP NEGERI 3 BOBOTSARI	585.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	585.700.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	585.700.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	535.700.000	
1.01.2.22.0.00.02.73	SMP NEGERI 4 BOBOTSARI	381.300.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	381.300.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	381.300.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	311.300.000	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	356.417.091.000	
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	356.417.091.000	
1.02.0.00.0.00.01.00	DINAS KESEHATAN	154.079.764.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.180.727.000	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.030.655.000	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.673.775.000	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72.125.000	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	284.755.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.418.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.600.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.425.000	
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.493.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.350.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.350.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.931.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.560.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	17.174.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.697.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.373.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.948.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.425.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.872.139.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.046.719.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.500.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.332.479.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.185.605.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.138.602.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.890.033.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.706.360.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.500.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	688.295.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	65.625.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.605.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.197.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.813.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.617.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.820.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.790.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	344.135.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	391.144.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.190.354.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	998.635.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	99.992.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	206.870.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	133.865.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	48.067.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.130.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	211.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.903.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.340.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	280.531.000	

1	2	3	4
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	260.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	559.262.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.710.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	249.250.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	102.200.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	41.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	61.200.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.860.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5.155.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.665.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6.040.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	129.907.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	5.000.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.500.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.500.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	95.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	20.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.907.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.907.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	267.502.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.960.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.960.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	629.489.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.114.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.600.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.425.000	
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	44.493.000	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.350.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.350.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.931.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.560.000	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.174.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.697.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.373.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.948.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.425.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.872.139.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.046.719.000	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.500.000.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.332.479.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.185.605.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.138.602.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.890.033.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.706.360.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.500.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	688.295.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	65.625.000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	51.605.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.197.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.813.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.617.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.820.000	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.790.000	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	344.135.000	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	391.144.000	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	8.190.354.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	998.635.000	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	99.992.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	206.870.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	133.865.000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	48.067.000	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.130.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	211.250.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	178.903.000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.340.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	280.531.000	

1	2	3	4
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	260.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	559.262.000	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.710.000	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	249.250.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	102.200.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	41.000.000	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	61.200.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.860.000	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5.155.000	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.665.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6.040.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	129.907.000	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	5.000.000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.500.000	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.500.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	95.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	20.000.000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	75.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.907.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.907.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	267.502.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.960.000	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	38.960.000	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	629.489.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.114.000	

1	2	3	4
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	380.114.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166.975.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	166.975.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.400.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	82.400.000	
1.02.0.00.0.00.01.0027	PUSKESMAS BOBOTSARI	5.210.228.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.179.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.179.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.179.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.031.228.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.031.228.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.031.228.000	
1.02.0.00.0.00.01.0101	RSUD GOETENG TAROENADIBRATA	91.300.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.300.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	91.300.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	91.300.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.0102	RSUD PANTI NUGROHO	27.537.144.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.537.144.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.537.144.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.537.144.000	
1.02.0.00.0.00.01.0103	UPTD LABKES	812.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	812.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	812.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	812.000.000	
1.02.0.00.0.00.01.10	PUSKESMAS PURBALINGGA	2.640.626.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.600.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.600.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.600.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.040.626.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.040.626.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.040.626.000	
1.02.0.00.0.00.01.11	PUSKESMAS BOJONG	1.989.704.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	875.350.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	875.350.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	875.350.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.114.354.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.114.354.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.114.354.000	
1.02.0.00.0.00.01.12	PUSKESMAS KUTASARI	5.152.241.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.032.790.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.032.790.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.032.790.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.119.451.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.119.451.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.119.451.000	
1.02.0.00.0.00.01.13	PUSKESMAS BOJONGSARI	4.240.805.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.180.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.180.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.180.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.060.805.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.060.805.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.060.805.000	
1.02.0.00.0.00.01.14	PUSKESMAS KALIMANAH	3.674.377.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.371.600.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.371.600.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.371.600.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.302.777.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.302.777.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.302.777.000	
1.02.0.00.0.00.01.15	PUSKESMAS PADAMARA	3.802.418.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.580.840.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.580.840.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.580.840.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.221.578.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.221.578.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.221.578.000	
1.02.0.00.0.00.01.16	PUSKESMAS KEMANGKON	4.876.126.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.724.860.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.724.860.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.724.860.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.151.266.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.151.266.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.151.266.000	
1.02.0.00.0.00.01.17	PUSKESMAS KALIGONDANG	3.179.815.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.192.765.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.192.765.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.192.765.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	987.050.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	987.050.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	987.050.000	
1.02.0.00.0.00.01.18	PUSKESMAS KALIKAJAR	2.272.969.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.153.200.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.153.200.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.153.200.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.119.769.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.119.769.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.119.769.000	
1.02.0.00.0.00.01.19	PUSKESMAS KEJOBONG	4.433.983.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.445.321.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.445.321.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.445.321.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	988.662.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	988.662.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	988.662.000	
1.02.0.00.0.00.01.20	PUSKESMAS PENGADEGAN	3.589.583.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.618.354.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.618.354.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.618.354.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	971.229.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	971.229.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	971.229.000	
1.02.0.00.0.00.01.21	PUSKESMAS BUKATEJA	3.687.700.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.856.040.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.856.040.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.856.040.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	831.660.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.660.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	831.660.000	
1.02.0.00.0.00.01.22	PUSKESMAS KUTAWIS	2.683.768.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.890.947.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.890.947.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.890.947.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	792.821.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	792.821.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	792.821.000	
1.02.0.00.0.00.01.23	PUSKESMAS REMBANG	4.639.989.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.545.880.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.545.880.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.545.880.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.094.109.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.094.109.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.094.109.000	
1.02.0.00.0.00.01.24	PUSKESMAS KARANGANYAR	4.572.302.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.553.194.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.553.194.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.553.194.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.019.108.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.019.108.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.019.108.000	
1.02.0.00.0.00.01.25	PUSKESMAS KARANGMONCOL	4.453.085.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.480.000.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.480.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.480.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	973.085.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	973.085.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	973.085.000	
1.02.0.00.0.00.01.26	PUSKESMAS KARANGTENGAH	3.072.034.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.139.690.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.139.690.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.139.690.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	932.344.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	932.344.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	932.344.000	
1.02.0.00.0.00.01.28	PUSKESMAS MREBET	3.399.314.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.421.878.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.421.878.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.421.878.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	977.436.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	977.436.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	977.436.000	
1.02.0.00.0.00.01.29	PUSKESMAS SERAYU LARANGAN	3.763.727.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.684.483.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.684.483.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.684.483.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.079.244.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.079.244.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.079.244.000	
1.02.0.00.0.00.01.30	PUSKESMAS KARANGREJA	4.764.453.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.900.400.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.900.400.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.900.400.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	864.053.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	864.053.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	864.053.000	
1.02.0.00.0.00.01.31	PUSKESMAS KARANGJAMBU	2.588.936.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.629.285.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.629.285.000	

1	2	3	4
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.629.285.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	959.651.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	959.651.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	959.651.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.097.580.000	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.838.169.000	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.838.169.000	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.823.427.000	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.900.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.634.397.000	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.188.472.000	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.057.000	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	382.868.000	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60.000.000	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.229.000	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.602.000	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.587.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.040.000	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.600.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.859.000	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.055.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.600.000	
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.704.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.042.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.900.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.142.000	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.786.425.000	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.786.425.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.304.169.000	
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	490.325.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.910.400.000	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	81.531.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.802.949.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.802.949.000	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	232.149.000	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.570.800.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	71.252.211.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	71.252.211.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	488.025.000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	23.417.827.000	

1	2	3	4
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	18.035.494.000	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.463.500.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	14.253.440.000	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	4.229.525.000	
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	492.400.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.872.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	63.057.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	26.749.000	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	15.479.000	
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	11.270.000	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	36.308.000	
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	36.308.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	110.100.000	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	36.000.000	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	36.000.000	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	74.100.000	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	74.100.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.259.411.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	13.259.411.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.471.036.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.471.036.000	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.959.200.000	
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.511.836.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.820.000.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.820.000.000	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.820.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.968.375.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.968.375.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.968.375.000	
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.964.140.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.964.140.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6.964.140.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.989.064.000	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.105.688.000	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.886.712.000	
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.310.000	
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	154.666.000	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.800.000	
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.800.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.877.000	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.050.000	

1	2	3	4
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.862.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.925.000	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.640.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.991.000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.125.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.366.000	
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.300.000	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.200.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.708.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.183.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.525.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	305.976.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10.000.000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.000.000	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	10.000.000	
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	10.000.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	244.726.000	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	244.726.000	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21.250.000	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	21.250.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	424.250.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	424.250.000	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	424.250.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.244.850.000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.244.850.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.231.250.000	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	13.600.000	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.326.677.000	
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.253.944.000	
1.05.0.00.0.00.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.253.944.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.021.186.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.282.391.000	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.095.465.000	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.910.000	

1	2	3	4
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	123.016.000	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.900.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.150.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.925.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.425.000	
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.318.505.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.450.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.545.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.750.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.263.760.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.390.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	248.115.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.100.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.175.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	505.758.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.203.000	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	27.720.000	
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	25.231.000	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	5.000.000	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	434.252.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	13.555.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.395.000	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5.160.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	727.000.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.804.000	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	562.289.000	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	136.515.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	28.196.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	28.196.000	
1.05.0.00.0.00.02.00	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.072.733.000	
1.05.0.00.0.00.02.00	PELAKSANA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.072.733.000	

1	2	3	4
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.390.346.000	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.577.786.000	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.439.493.000	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.593.000	
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	86.700.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.966.000	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.910.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.656.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.500.000	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.600.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.094.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.464.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.630.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	682.387.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.000.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	529.662.000	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	374.800.000	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	14.500.000	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	9.812.000	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	45.275.000	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.275.000	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	127.725.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	26.300.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	101.425.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.261.056.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.261.056.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.261.056.000	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.384.886.000	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.143.844.000	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.962.899.000	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.000.000	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	109.945.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.500.000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.500.000	

1	2	3	4
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.360.000	
1.06.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.360.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	102.376.000	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.316.000	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.660.000	
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.400.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.900.000	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.100.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.000.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.406.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.006.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.400.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.862.900.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.862.900.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	403.000.000	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.550.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.434.000.000	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	7.350.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.841.485.000	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.841.485.000	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	2.386.000.000	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	23.975.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	151.510.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.155.000.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	95.000.000	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	5.000.000	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	685.200.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	685.200.000	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	156.000.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	529.200.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	386.585.000	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	350.000.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	250.000.000	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100.000.000	

1	2	3	4
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	36.585.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	36.585.000	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	100.000.000	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.003.838.000	
2.07.3.32.0.00.02.00	DINAS TENAGA KERJA	6.003.838.000	
2.07.3.32.0.00.02.00	DINAS TENAGA KERJA	6.003.838.000	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.006.188.000	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.855.956.000	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.748.556.000	
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000.000	
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	67.400.000	
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.429.000	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.619.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.450.000	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan	2.400.000	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.010.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.950.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.512.000	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.220.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.200.000	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658.092.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.291.000	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.262.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.159.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.870.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	25.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	25.000.000	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	25.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	407.725.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	397.725.000	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	397.725.000	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	507.675.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	507.675.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	507.675.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	57.250.000	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	57.250.000	

1	2	3	4
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.250.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	610.473.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	610.473.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	610.473.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	405.535.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15.120.000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	15.120.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	374.800.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	28.800.000	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	346.000.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.615.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.615.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	54.156.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	34.615.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.615.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.541.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.541.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.000.000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	84.497.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.490.000	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	17.000.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28.490.000	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	39.007.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.412.000	

1	2	3	4
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.750.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.845.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	53.285.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.275.000	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.510.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.765.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.010.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.010.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.410.424.000	
2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11.410.424.000	
2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	11.410.424.000	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.358.372.000	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.607.795.000	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.445.670.000	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.000.000	
2.09.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	91.125.000	
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.371.000	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.571.000	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.900.000	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.625.000	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.500.000	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	325.425.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.581.000	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.706.000	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.875.000	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	5.025.000.000	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.025.000.000	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	5.020.000.000	
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	5.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	108.402.000	

1	2	3	4
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.602.000	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.000.000	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4.420.000	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	11.182.000	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	82.800.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	10.000.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	63.800.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	9.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	859.650.000	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	859.650.000	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	859.650.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	59.000.000	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	29.000.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2,10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	363.875.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	363.875.000	
1.04.1.03.2.10.02.00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	363.875.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	4.500.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	278.250.000	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	278.250.000	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	278.250.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	81.125.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	81.125.000	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	81.125.000	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.028.286.000	
2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.028.286.000	
2.11.0.00.0.00.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	18.028.286.000	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.246.327.000	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.900.000	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.563.026.000	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.400.767.000	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.440.000	

1	2	3	4
2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106.819.000	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.647.000	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.055.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.752.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.640.000	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	13.200.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.604.000	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	852.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.660.000	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.900.000	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.192.000	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.150.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	307.360.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.385.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.405.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	38.425.000	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	18.425.000	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	18.425.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	20.000.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.490.253.000	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.490.253.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.465.253.000	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	975.483.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	975.483.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	893.603.000	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	21.522.000	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	60.358.000	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.398.000	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	13.398.000	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	13.398.000	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.798.000	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.798.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	10.023.000	

1	2	3	4
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	40.775.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	14.130.000	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.130.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	14.130.000	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.037.000	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.037.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.037.000	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.655.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	22.655.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	22.655.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.151.780.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	5.151.780.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.091.780.000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	60.000.000	
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.925.029.000	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.925.029.000	
2.12.0.00.0.00.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.925.029.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.261.101.000	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.648.696.000	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.763.630.000	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.200.000	
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	63.866.000	
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.000.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.214.784.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	520.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	5.000.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.264.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.621.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.621.000	

1	2	3	4
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.338.972.000	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.338.972.000	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1.338.972.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	112.976.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	112.976.000	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	112.976.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	211.980.000	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	211.980.000	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	211.980.000	
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.959.566.000	
2.13.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.959.566.000	
2.13.0.00.0.00.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.959.566.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.483.453.000	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.109.050.000	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.981.077.000	
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.223.000	
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80.750.000	
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.550.000	
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.550.000	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.419.000	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.619.000	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.400.000	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000	
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.807.000	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.345.000	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.512.000	
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.950.000	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.627.000	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.382.000	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.245.000	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.000.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	40.900.000	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	40.900.000	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	8.500.000	
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	32.400.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	650.466.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	650.466.000	
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9.100.000	
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	22.625.000	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	245.725.000	
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	206.250.000	

1	2	3	4
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	11.441.000	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	22.328.000	
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000	
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	21.551.000	
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	5.000.000	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000	
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46.446.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	784.747.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	784.747.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	507.625.000	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10.600.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.506.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.785.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	234.231.000	
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.366.178.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.366.178.000	
1.06.2.14.2.08.06.00	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.366.178.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	311.505.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	90.700.000	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	15.000.000	
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	7.700.000	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	18.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	220.805.000	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10.000.000	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	66.200.000	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	25.605.000	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	119.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.126.463.000	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.173.815.000	
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	

1	2	3	4
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	76.640.000	
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	18.000.000	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	280.800.000	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	729.000.000	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.147.200.000	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.147.200.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.201.698.000	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.950.000	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.585.781.000	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10.000.000	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.547.317.000	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.650.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	603.750.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	603.750.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.928.210.000	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.913.210.000	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	330.000.000	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.350.000	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.536.660.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21.200.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	15.000.000	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11.721.938.000	
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	11.721.938.000	
2.15.0.00.0.00.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	11.721.938.000	

1	2	3	4
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.229.785.000	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.906.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.405.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.501.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.357.356.000	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.893.000	
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.179.000	
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	172.284.000	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.418.000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.418.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.650.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.750.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000	
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.500.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.161.072.000	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.200.000	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.039.872.000	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.383.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.783.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.600.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.492.153.000	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.783.597.000	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.931.200.000	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	486.200.000	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.176.197.000	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	190.000.000	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	65.600.000	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	65.600.000	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	69.225.000	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	69.225.000	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	307.351.000	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	307.351.000	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.990.000	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	13.990.000	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	25.990.000	
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	25.990.000	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.400.000	

1	2	3	4
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	91.400.000	
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.166.455.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.166.455.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.166.455.000	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.811.129.000	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.997.994.000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.880.941.000	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.403.000	
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	77.650.000	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.216.000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.645.000	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.571.000	
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.150.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.150.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499.922.000	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	972.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.400.000	
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.900.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	454.650.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.847.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.835.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.512.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	596.156.000	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	596.156.000	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	231.500.000	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	320.840.000	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	23.991.000	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	19.825.000	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	759.170.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	707.355.000	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.080.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	645.275.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.815.000	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	51.815.000	
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.278.013.000	
2.17.0.00.0.00.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.278.013.000	

1	2	3	4
2.17.0.00.0.00.01.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.278.013.000	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.159.417.000	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.515.787.000	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.348.097.000	
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.440.000	
2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	110.250.000	
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.000.000	
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.625.000	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantcr	39.625.000	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.725.000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.475.000	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.950.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.280.000	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.480.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	35.350.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	35.350.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.350.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	59.025.000	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	59.025.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.425.000	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.600.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	435.329.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.329.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	285.329.000	
2.17.05.2.02	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	150.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	124.022.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.022.000	

1	2	3	4
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	124.022.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	667.270.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	667.270.000	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	63.750.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	40.120.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	563.400.000	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.797.600.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.797.600.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.797.600.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.142.982.000	
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.142.982.000	
2.18.0.00.0.00.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.142.982.000	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.094.521.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.663.336.000	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.549.367.000	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.344.000	
2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.625.000	
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.697.000	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.814.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.983.000	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.500.000	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.550.000	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.500.000	
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.000.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.938.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.358.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.580.000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	38.100.000	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.600.000	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15.600.000	

1	2	3	4
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.000.000	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	17.500.000	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8.750.000	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	8.750.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	49.495.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	49.495.000	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	8.750.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.745.000	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	547.115.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	547.115.000	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	526.550.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	6.000.000	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	6.975.000	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	7.590.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	397.601.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	397.601.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.274.000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	242.464.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	36.863.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	16.150.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.150.000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	16.150.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.910.501.000	
2.19.3.26.0.00.02.00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14.910.501.000	
2.19.3.26.0.00.02.00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	14.910.501.000	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.335.112.000	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.176.536.000	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.608.000	
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.828.000	
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	103.100.000	
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.123.000	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000	

1	2	3	4
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.873.000	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.225.000	
2.19.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.947.000	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	486,000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.045.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	751.416.000	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.506.000	
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.406.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000	
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.022.204.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	450.504.000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	95.308.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	355.196.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	571.700.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	571.700.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.193.185.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.085.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.085.000.000	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.085.000	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	133.693.000	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	349.601.000	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	355.791.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12.500.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	12.500.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.256.600.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.256.600.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	360.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	360.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	360.000.000	
2,20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	26.391.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.391.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.391.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	26.391.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.391.000	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	15.420.000	
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	10.971.000	
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	48.000.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.000.000	
2.16.2.20.2.21.03.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.000.000	

1	2	3	4
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	48.000.000	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.000.000	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.379.944.000	
1.01.2.22.0.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.379.944.000	
1.01.2.22.0.00.02.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.379.944.000	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	253.525.000	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.000.000	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	72.000.000	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	161.525.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	161.525.000	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	20.000.000	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	45.972.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.972.000	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	45.972.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	282.771.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	58.481.000	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	58.481.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	224.290.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	165.428.000	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	58.862.000	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	797.676.000	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	797.676.000	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	98.375.000	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	644.301.000	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	55.000.000	
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	9.872.337.000	
2.24.2.23.0.00.02.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9.872.337.000	
2.24.2.23.0.00.02.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9.872.337.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	9.847.337.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.697.005.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.577.380.000	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	20.975.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	60.000.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	13.650.000	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.332.000	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	70.000.000	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	17.832.000	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	62.500.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	25.000.000	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25.000.000	
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.563.990.000	
2.24.2.23.0.00.02.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.563.990.000	

1	2	3	4
2.24.2.23.0.00.02.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.563.990.000	
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.475.945.000	
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.680.623.000	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.745.000	
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.403.000	
2.24.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	95.475.000	
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	
2.24.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.229.000	
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.729.000	
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000	
2.24.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.258.000	
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540.000	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.350.000	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.368.000	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.235.000	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.965.000	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.350.000	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.920.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	45.545.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	23.545.000	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	23.545.000	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.000.000	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	42.500.000	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	17.000.000	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	8.500.000	
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	8.500.000	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25.500.000	
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.500.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	319.000.000	
2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	319.000.000	
2.09.3.25.0.00.02.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	319.000.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	75.000.000	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	70.000.000	

1	2	3	4
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	202.000.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	167.000.000	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	42.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	7.000.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	35.000.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	497.105.000	
2.19.3.26.0.00.02.00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	497.105.000	
2.19.3.26.0.00.02.00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	497.105.000	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	279.064.000	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	47.000.000	
3.26.02.2.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	17.000.000	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30.000.000	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	204.250.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	64.950.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	139.300.000	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	27.814.000	
3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	27.814.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	156.775.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	156.775.000	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	111.500.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	45.275.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	61.266.000	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	61.266.000	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	61.266.000	
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	50.221.596.000	
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN	50.221.596.000	
3.27.0.00.0.00.01.00	DINAS PERTANIAN	50.221.596.000	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.048.373.000	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.270.554.000	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.095.760.000	
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.169.000	
3.27.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125.625.000	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	

1	2	3	4
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.069.000	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.569.000	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.400.000	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000	
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.540.000	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.240.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.600.000	
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.800.000	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.900.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.210.000	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.330.000	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.580.000	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.300.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.987.895.000	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.555.820.000	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.456.720.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	99.100.000	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.015.775.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemumian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	80.000.000	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	935.775.000	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak, dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota	416.300.000	
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Temak	416.300.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.028.418.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	28.525.000	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	28.525.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.091.643.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.299.813.000	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.345.500.000	
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2.400.000.000	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.046.330.000	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Temak dan Rumpun/Galur Temak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10.908.250.000	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Temak dan Rumpun/Galur Temak	10.908.250.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	234.559.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.935.000	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	108.935.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.680.000	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	28.680.000	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	23.280.000	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.280.000	

1	2	3	4
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	73.664.000	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	73.664.000	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	398.275.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	398.275.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	109.755.000	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	288.520.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.524.076.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.524.076.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	201.114.000	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.049.483.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	230.979.000	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	42.500.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	13.558.351.000	
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.558.351.000	
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.558.351.000	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.312.221.000	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.910.000	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.407.000	
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.503.000	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.538.446.000	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.378.455.000	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.831.000	
3.30.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	106.160.000	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.619.000	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.309.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.660.000	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000	
3.30.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.000.000	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.132.000	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.400.000	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	458.232.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.114.000	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.664.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.450.000	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	27.087.000	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	13.583.000	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.583.000	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	13.504.000	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	13.504.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.921.496.000	

1	2	3	4
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.803.371.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.682.808.000	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.120.563.000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	118.125.000	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	118.125.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	89.923.000	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	32.878.000	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	32.878.000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	32.519.000	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	32.519.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.526.000	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24.526.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	207.624.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	207.624.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	207.624.000	
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	799.060.000	
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	799.060.000	
3.31.3.30.0.00.02.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	799.060.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	777.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	777.000.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	50.000.000	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	434.500.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	292.500.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.520.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	13.520.000	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.520.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	8.540.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	8.540.000	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	8.540.000	
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	15.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.00	DINAS TENAGA KERJA	15.000.000	
2.07.3.32.0.00.02.00	DINAS TENAGA KERJA	15.000.000	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.000.000	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	

1	2	3	4
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4,01	SEKRETARIAT DAERAH	57.880.659.000	
4.01.0.00.0.00.01.00	SEKRETARIAT DAERAH	57.880.659.000	
4.01.0.00.0.00.01.01	BAGIAN UMUM	38.732.917.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.732.917.000	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.801.215.000	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.287.551.000	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	232.000.000	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	281.664.000	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.654.317.000	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.904.000	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	496.413.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	976.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.700.000	
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.700.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.719.806.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.584.556.000	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263.850.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	864.700.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.316.800.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	438.300.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	578.500.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	776.000.000	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	776.000.000	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.168.079.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.750.000.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.418.079.000	
4.01.0.00.0.00.01.04	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	173.960.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	173.960.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	173.960.000	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	32.425.000	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.419.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	41.116.000	
4.01.0.00.0.00.01.05	BAGIAN HUKUM	479.680.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	479.680.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	479.680.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	62.684.000	

1	2	3	4
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	279.926.000	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	137.070.000	
4.01.0.00.0.00.01.06	BAGIAN PEMERINTAHAN	469.108.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	469.108.000	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	455.125.000	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	190.625.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50.000.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	214.500.000	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	13.983.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	13.983.000	
4.01.0.00.0.00.01.07	BAGIAN PEREKONOMIAN	3.766.368.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.766.368.000	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	890.041.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	105.852.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	560.079.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	224.110.000	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2.876.327.000	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2.871.026.000	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2.660.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2.641.000	
4.01.0.00.0.00.01.08	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.317.423.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13.317.423.000	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	13.317.423.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13.253.650.000	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8.913.000	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	54.860.000	
4.01.0.00.0.00.01.09	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	388.294.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	388.294.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	388.294.000	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	210.491.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24.369.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	153.434.000	
4.01.0.00.0.00.01.10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	348.650.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	348.650.000	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	348.650.000	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	313.815.000	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	21.000.000	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	13.835.000	
4.01.0.00.0.00.01.11	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	204.259.000	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.259.000	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	204.259.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	45.393.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	29.116.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	129.750.000	
4,02	SEKRETARIAT DPRD	48.312.663.000	
4.02.0.00.0.00.02.00	SEKRETARIAT DPRD	48.312.663.000	
4.02.0.00.0.00.02.00	SEKRETARIAT DPRD	48.312.663.000	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.653.240.000	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.789.000	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.227.000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.562.000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.017.947.000	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.365.650.000	

1	2	3	4
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.563.172.000	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.125.000	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.085.175.000	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.938.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.613.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	635.074.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.550.000	
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.000.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.000.000	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.600.000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.500.000	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.181.200.000	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.006.079.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.279.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.800.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.982.250.000	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	21.534.500.000	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	416.250.000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	31.500.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.075.000.000	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	50.000.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	125.000.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	900.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.659.423.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.498.935.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	472.813.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.326.122.000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	500.000.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	200.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.758.933.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	506.262.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	502.587.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	255.766.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	252.166.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	1.136.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	241.016.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.199.864.000	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	549.460.000	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	622.510.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	634.157.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	858.245.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	140.398.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	395.094.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.974.361.000	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.028.820.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	191.750.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.000.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	633.680.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	910.111.000	

1	2	3	4
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.971.366.000	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	27.000.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.685.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	2.932.681.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	262.867.000	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	262.867.000	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	332.398.000	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	34.686.000	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	297.712.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	660.699.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	579.408.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.029.000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	79.262.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5,01	PERENCANAAN	5.918.707.000	
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.918.707.000	
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.918.707.000	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.816.048.000	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.044.765.000	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.702.977.000	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.161.000	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	143.627.000	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.280.000	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.280.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.153.000	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.543.000	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.250.000	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21.960.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.046.000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.520.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.400.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.626.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.804.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.035.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.769.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	583.084.000	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	400.036.000	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	59.850.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	133.000.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	207.186.000	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	77.500.000	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	77.500.000	

1	2	3	4
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.548.000	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	62.000.000	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	43.548.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	519.575.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	188.475.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68.200.000	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49.250.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71.025.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	115.550.000	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.275.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.275.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	215.550.000	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.850.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23.425.000	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.275.000	
5,02	KEUANGAN	428.721.357.000	
5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN KEUANGAN DAERAH	428.721.357.000	
5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN KEUANGAN DAERAH	428.721.357.000	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.353.000	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.264.848.000	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.950.672.000	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.384.000	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	274.792.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.900.000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.900.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.440.000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.166.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.524.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.330.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.020.000	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	349.000.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.220.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.720.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	270.600.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.900.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.945.000	

1	2	3	4
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.860.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.275.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.810.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	414.197.620.000	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	492.608.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	89.050.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	70.400.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	167.769.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	165.389.000	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	161.474.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20.570.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	93.208.000	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	21.821.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25.875.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	89.200.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	89.200.000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	413.454.338.000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	392.816.600.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	13.700.000.000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6.937.738.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.159.777.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.159.777.000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	133.330.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	133.347.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	893.100.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	845.607.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	845.607.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	519.523.000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	136.784.000	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	189.300.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	7.612.910.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.612.910.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7.612.910.000	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.482.581.000	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.114.514.000	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.993.231.000	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.308.000	
5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	92.975.000	
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.313.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.940.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.339.000	

1	2	3	4
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.717.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.717.000	
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.200.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.605.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.940.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.725.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.149.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.779.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.370.000	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.130.329.000	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	404.332.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10.000.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	362.250.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	21.432.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.650.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	255.204.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	185.088.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	70.116.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.420.643.000	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	25.000.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	161.625.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	28.018.000	
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	1.204.000.000	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2.000.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50.150.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.250.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	8.500.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	20.400.000	
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	800.500.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	800.500.000	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	800.500.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.500.000	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	800.500.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	800.500.000	
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	122.400.000	
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	122.400.000	
5.01.5.05.0.00.02.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	122.400.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	122.400.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	122.400.000	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	77.125.000	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	45.275.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6,01	INSPEKTORAT DAERAH	7.531.511.000	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	7.531.511.000	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH	7.531.511.000	

1	2	3	4
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.700.245.000	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.238.185.000	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.089.635.000	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.750.000	
6.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.800.000	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.150.000	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.250.000	
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.000.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.350.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.350.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.732.000	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.732.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.828.000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.928.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.900.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	611.807.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	510.007.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43.142.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31.160.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	25.000.000	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	20.000.000	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	43.275.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	347.430.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	101.800.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	84.750.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.050.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	219.459.000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	26.433.000	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	26.433.000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	193.026.000	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62.250.000	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49.771.000	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	31.225.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.780.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	53.832.406.000	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN KEMANGKON	1.763.696.000	
7.01.0.00.0.00.01.00	KECAMATAN KEMANGKON	1.763.696.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.496.901.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.276.383.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.230.743.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.120.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42.520.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.630.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.150.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.890.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.850.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.068.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.040.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.928.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.080.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.650.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.939.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.570.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.570.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.369.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.369.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	86.025.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	86.025.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48.220.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.805.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.184.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.184.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.784.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.247.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.247.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	46.247.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.400.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.400.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.480.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.920.000	
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN BUKATEJA	2.039.411.000	
7.01.0.00.0.00.02.00	KECAMATAN BUKATEJA	2.039.411.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.871.473.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.555.517.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.527.450.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.630.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.437.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.267.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.340.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.687.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.500.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.728.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.728.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.221.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.850.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.256.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.115.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.383.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.110.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.110.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.273.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.273.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.246.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64.246.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.212.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.034.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	39.190.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	39.190.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.080.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.110.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.954.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.954.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.954.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.165.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.165.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.245.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.920.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN KEJOBONG	1.928.611.000	
7.01.0.00.0.00.03.00	KECAMATAN KEJOBONG	1.928.611.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.682.699.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.340.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.460.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.880.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.122.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.647.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.475.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.164.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.424.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.808.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.680.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.128.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.565.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.065.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.668.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.468.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.468.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.200.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77.318.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.318.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.318.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	69.726.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69.726.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	27.226.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.500.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	29.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.700.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.700.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.130.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.570.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KALIGONDANG	1.926.069.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN KALIGONDANG	1.926.069.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.697.763.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.448.499.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.324.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.000.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	43.175.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.370.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.850.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.404.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.279.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.125.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.750.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.750.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.476.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.476.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.476.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.125.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.125.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	52.275.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.850.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.375.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.375.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.850.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.525.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.425.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.425.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.425.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.905.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33.905.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.135.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.770.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PURBALINGGA	16.607.384.000	

1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN PURBALINGGA	10.496.898.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.293.290.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.061.524.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.024.751.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.928.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32.845.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.363.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	930.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.021.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.672.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.203.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.900.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.128.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.460.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.350.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.347.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.347.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.003.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7.003.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.488.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.488.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.792.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.696.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.633.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	48.633.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.280.000	
7.01.04.2.01.02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	18.353.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	53.137.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.137.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53.137.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.000.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.01	KELURAHAN BOJONG	604.206.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.206.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.297.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.297.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.859.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.504.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.035.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.500.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.882.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.550.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.332.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.368.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.868.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	
7.01.000.000.05.02	KELURAHAN KEDUNGMEJANGAN	544.504.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.504.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.700.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.700.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.764.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.440.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.950.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.574.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.080.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.982.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	650.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.332.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.258.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.358.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.200.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.700.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	179.900.000	

1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	220.100.000	
7.01.0.00.0.00.05.03	KELURAHAN BANCAR	539.515.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.515.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.600.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.600.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.650.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.650.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.640.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.075.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.475.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.250.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.920.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.850.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.700.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.775.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.675.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	136.415.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	263.585.000	
7.01.0.00.0.00.05.04	KELURAHAN PURBALINGGA WETAN	528.480.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.930.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.650.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.650.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.625.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	450.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.605.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	550.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.044.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.180.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.264.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.811.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.342.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.439.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	399.550.000	

1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	399.550.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.050.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	219.500.000	
7.01.0.00.0.00.05.05	KELURAHAN PURBALINGGA KULON	520.677.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.677.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.900.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	900.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.072.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	725.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.877.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.150.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.384.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.120.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.864.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.521.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.586.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.935.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	234.430.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	165.570.000	
7.01.0.00.0.00.05.06	KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL	549.257.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	149.257.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.570.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.570.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.803.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	545.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.415.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.448.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.375.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.772.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.770.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.002.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.312.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.314.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.850.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.148.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000	

1	2	3	4
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.07	KELURAHAN PURBALINGGA LOR	569.196.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.196.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.000.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	900.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.496.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	660.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.236.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.280.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.800.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.520.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.880.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	126.795.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	273.205.000	
7.01.0.00.0.00.05.08	KELURAHAN PENAMBONGAN	625.105.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.105.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.000.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.000.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.400.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.400.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.930.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.050.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.960.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.600.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.350.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.750.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.425.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.725.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	152.520.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	247.480.000	
7.01.0.00.0.00.05.09	KELURAHAN KANDANGGAMPANG	533.705.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133.705.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.453.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.453.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.220.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	700.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.900.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.332.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.332.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.900.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.900.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	193.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	207.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.10	KELURAHAN KEMBARAN KULON	563.541.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.541.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.220.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.220.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.873.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.653.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.600.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.914.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.450.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.264.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.734.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.944.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.790.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	
7.01.0.00.0.00.05.11	KELURAHAN WIRASANA	532.300.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.300.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.600.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.600.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.050.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.050.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.696.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	870.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.506.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.954.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.754.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KALIMANAH	5.808.404.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KALIMANAH	4.136.998.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.898.486.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.460.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.960.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.654.118.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.587.813.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.425.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.880.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.750.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.510.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.728.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.600.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.128.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.630.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.430.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.200.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.830.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.830.000	

1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.830.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	77.125.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	77.125.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.275.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.850.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.275.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.275.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	47.625.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.650.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.392.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.392.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	36.392.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.890.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.890.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.670.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.220.000	
7.01.00.0.00.06.01	KELURAHAN MEWEK	550.938.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.938.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.736.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.736.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.403.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.183.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.314.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	750.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.064.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.685.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.004.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.681.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	168.290.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.710.000	
7.01.00.0.00.06.02	KELURAHAN KARANGMANYAR	567.723.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.723.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.930.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.430.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.500.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.140.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.140.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.846.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	825.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.401.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.900.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.582.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.332.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.225.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.240.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.400.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.585.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	220.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.000.000	
7.01.0.00.0.00.06.03	KELURAHAN KALIKABONG	552.745.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	152.745.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.868.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.868.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.000.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.327.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.732.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.375.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.400.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.232.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.732.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.518.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.518.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.800.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259.200.000	
7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN KUTASARI	2.065.023.000	
7.01.0.00.0.00.07.00	KECAMATAN KUTASARI	2.065.023.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.839.062.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.591.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.512.211.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.800.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.580.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.371.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.731.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.700.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.700.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.977.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.685.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.992.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.383.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.188.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.820.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.375.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.873.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.569.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.569.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.304.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.304.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83.504.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	83.504.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.459.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.045.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.880.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.880.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.455.000	
7.01.04.2.01.02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.425.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.154.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.154.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.154.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	29.550.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.550.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.305.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.245.000	
7.01.0.00.0.00.08.00	KECAMATAN MREBET	1.980.672.000	
7.01.0.00.0.00.08.00	KECAMATAN MREBET	1.980.672.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.719.982.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.517.454.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.463.606.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.928.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	49.920.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.002.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.662.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.146.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.440.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.260.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.196.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.640.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.140.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.615.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.615.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.300.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.315.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.260.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	130.260.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.160.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.100.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.615.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	44.615.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.200.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.415.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.000.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.200.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.200.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	15.200.000	
7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN BOBOTSARI	1.919.958.000	
7.01.0.00.0.00.09.00	KECAMATAN BOBOTSARI	1.919.958.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.732.648.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.452.828.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.403.933.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.800.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.095.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.079.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.304.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.035.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.501.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.341.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.260.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.500.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.250.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.250.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.000.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	76.370.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76.370.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.570.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.800.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	54.770.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	54.770.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.770.000	
7.01.04.2.01.02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	17.750.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17.750.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.420.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.420.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.420.000	
7.01.0.00.0.00.10.00	KECAMATAN KARANGREJA	1.749.100.000	
7.01.0.00.0.00.10.00	KECAMATAN KARANGREJA	1.749.100.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.578.145.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.306.089.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.265.869.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.600.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.620.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.472.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.197.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.035.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.796.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.396.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.048.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.815.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.650.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.583.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.553.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.490.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.490.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.063.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.063.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	59.890.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.890.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.090.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.800.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.200.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.200.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.200.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.312.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.312.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.312.000	
7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN KARANGANYAR	1.724.335.000	
7.01.0.00.0.00.11.00	KECAMATAN KARANGANYAR	1.724.335.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.521.495.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.255.795.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.225.325.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.550.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.920.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.705.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.315.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.650.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.825.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	652.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.400.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.420.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.353.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.430.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.280.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.345.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.465.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.465.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.880.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.440.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.440.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.090.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.090.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.640.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.450.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.625.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.625.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.225.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	38.500.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.500.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38.500.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.280.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.280.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.710.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.570.000	
7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN KARANGMONCOL	1.811.478.000	
7.01.0.00.0.00.12.00	KECAMATAN KARANGMONCOL	1.811.478.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.604.443.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.386.197.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.295.967.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.910.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.320.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.830.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.319.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.143.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.628.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.872.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	519.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.375.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.978.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.804.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.875.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.412.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.517.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.382.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.781.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.781.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.601.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.501.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.100.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.186.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.186.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.721.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.465.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.364.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40.364.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.800.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.564.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.803.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.803.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.803.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.300.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.300.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.400.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.900.000	
7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN REMBANG	1.867.858.000	
7.01.0.00.0.00.13.00	KECAMATAN REMBANG	1.867.858.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.692.848.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.371.549.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.536.829.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.000.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.720.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.979.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.503.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.736.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.300.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.960.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	1.680.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.460.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.280.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.275.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.555.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.293.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.329.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.329.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.964.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.964.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.773.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.773.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.449.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.324.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.905.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	31.905.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.705.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.200.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.379.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.379.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.379.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.660.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.660.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.440.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.220.000	
7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN BOJONGSARI	1.504.067.000	
7.01.0.00.0.00.14.00	KECAMATAN BOJONGSARI	1.904.067.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.721.787.000	

1	2	3	4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.250.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750,000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.428.757.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.384.432.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.525.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.800.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.346.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.761.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.525.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.240.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.524.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.524.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.210.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.210.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.825.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.425.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.425.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	400,000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	400,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.850.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.850.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.850.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.150.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.150.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	
7.01.04.2.01.02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25.150.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.425.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.425.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23.425.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.030.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.030.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.920.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.110.000	
7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN PADAMARA	3.275.640.000	
7.01.0.00.0.00.15.00	KECAMATAN PADAMARA	2.728.518.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.146.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.106.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.200.283.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.148.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.675.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.601.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.721.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.340.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.300.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.502.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.575.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.627.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.197.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.697.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.570.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.330.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.330.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	240.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	240.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.100.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.100.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.675.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.425.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.225.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.225.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.825.000	
7.01.04.2.01.02	Hamonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.400.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.037.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	24.037.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	24.037.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.440.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.440.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.520.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.920.000	
7.01.0.00.0.00.15.1501	KELURAHAN KARANGSENTUL	547.122.000	

1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.122.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.630.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.530.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.100.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.800.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.800.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.580.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	825.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.735.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.052.000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.120.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.332.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.060.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.175.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.865.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.020.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.000.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.840.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	224.160.000	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PENGADEGAN	1.896.160.000	
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN PENGADEGAN	1.896.160.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.717.404.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.455.612.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.433.737.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.580.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.295.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.147.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.652.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.255.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.500.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.592.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.192.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.313.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.716.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.147.000	

1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.310.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.074.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.074.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.236.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.236.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.591.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.591.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.107.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.484.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.675.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	43.675.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.625.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.050.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.768.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.768.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.768.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.412.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.412.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16.412.000	
7.01.0.00.0.00.17.00	KECAMATAN KARANGJAMBU	1.719.108.000	
7.01.0.00.0.00.17.00	KECAMATAN KARANGJAMBU	1.719.108.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.527.242.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.266.431.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.231.111.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.600.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.720.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.152.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.197.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.035.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.660.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.400.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.260.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.259.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.280.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.550.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.429.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.553.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.490.000	

1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.490.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.063.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.063.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	57.790.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	57.790.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.390.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.400.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	56.033.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.033.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.719.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.314.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.200.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.200.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.200.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.290.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.290.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.720.000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.570.000	
7.01.00.0.00.18.00	KECAMATAN KERTANEGARA	1.845.432.000	
7.01.00.0.00.18.00	KECAMATAN KERTANEGARA	1.845.432.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.641.482.000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.385.617.000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.322.247.000	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.900.000	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	46.470.000	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.979.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.639.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.600.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.021.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.025.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.996.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.125.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.125.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29.125.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.025.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.025.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.100.000	

1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.100.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.075.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.075.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.075.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.525.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	32.525.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.525.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.575.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.575.000	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.575.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.650.000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.650.000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.650.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.182.669.000	
8.01.0.00.0.00.01.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.182.669.000	
8.01.0.00.0.00.01.00	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.182.669.000	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.189.127.000	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.950.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.620.000	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.330.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.322.000	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.500.532.000	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.340.000	
8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	98.450.000	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.623.000	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.035.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.988.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.400.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.200.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.982.000	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.782.000	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.200.000	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.250.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.150.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.100.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	146.809.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	146.809.000	

1	2	3	4
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	65.000.000	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	76.809.000	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.000.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.847.188.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.847.188.000	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.842.188.000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.000.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	524.350.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	524.350.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	267.350.000	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	252.000.000	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.000.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	288.375.000	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	288.375.000	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	61.500.000	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	226.875.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.186.820.000	

1	2	3	4
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.186.820.000	
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	528.820.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	553.000.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75.000.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	

**B. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer**

Plafon anggaran sementara belanja urusan sesuai kewenangan terdiri dari plafon anggaran sementara untuk belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja barang dan jasa.

Plafon anggaran sementara belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.2.073.343.588.000,00, yang penggunaannya dialokasikan untuk belanja operasi Rp.1.417.826.435.168,00, modal sebesar Rp.242.073.964.832,00, belanja tidak terduga Rp.13.700.000.000,00 dan belanja transfer Rp.399.743.188.000,00. Adapun rincian dari belanja operasi adalah sebagai berikut:

Secara lebih lengkap, rincian plafon anggaran sementara untuk belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam Tabel IV.2 berikut ini:

**Tabel IV.2.  
Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.417.826.435.168</b>
1.1	Belanja Pegawai	920.808.625.450
1.2	Belanja Barang dan Jasa	433.617.613.718
1.3	Belanja Bunga	-
1.4	Belanja Subsidi	500.000.000
1.5	Belanja Hibah	44.535.696.000
1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.364.500.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>242.073.964.832</b>
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>13.700.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>399.743.188.000</b>
3	Belanja Bagi Hasil	6.937.738.000
4	Belanja Bantuan Keuangan	392.805.450.000
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH (A+B+C)</b>		<b>2.073.343.588.000</b>

## V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 berisikan tentang proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp.63.750.000.000,00. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 karena efisiensi belanja dan accres gaji yang tidak terpakai.

### B. Pengeluaran Pembiayaan daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.4.362.500.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) daerah. Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut, maka terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp.58.012.500.000,00. Secara lebih rinci, Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1.

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	PLAFON (Rp.)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	63.750.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>63.750.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	
2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-
2.2	Penyertaan modal daerah	4.362.500.000
2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.362.500.000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>58.012.500.000</b>

## VI. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Rencana Pendapatan Daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 ini disusun berdasarkan asumsi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, apabila terdapat perubahan alokasi pendapatan maupun terdapat kegiatan mendesak yang menyebabkan adanya perubahan belanja, dapat dilakukan penyesuaian tanpa merubah kesepakatan PPAS TA 2022.

Purbalingga, 15 Oktober 2021

**BUPATI PURBALINGGA**

selaku

**PIHAK PERTAMA,**

  
DYAH HAYUNING PRATIWI, S., B.Econ., M.Si.

**PIMPINAN**

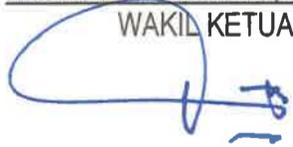
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

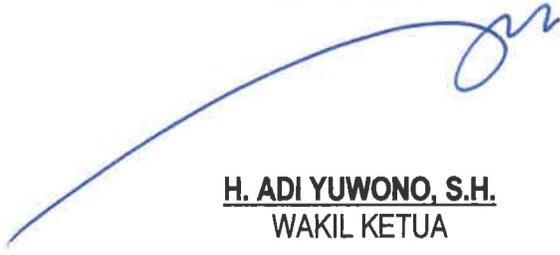
selaku

**PIHAK KEDUA,**

  
H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H.  
KETUA

  
H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.Si  
WAKIL KETUA

  
Hj. TENNY JULIAWATY, S.E.  
WAKIL KETUA

  
H. ADI YUWONO, S.H.  
WAKIL KETUA

